



## PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. MUHD DALI, M.M**  
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**  
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 2 Januari 2024

**PIHAK KEDUA,**  
**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

**PIHAK PERTAMA,**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**Dr. MUHD DALI, M.M**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641128 198903 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	77,78
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	8,50
		Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	29,45
		Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen	17,00
3.	Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam ber KB	Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi	59,00
4.	Terwujudnya Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	93,43
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	43,07

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13,385,402,257,-	APBD
2.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 1,406,111,015,-	APBD
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 1,390,668,584,-	APBD
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 3,967,427,213,-	APBD
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp. 10,000,000,-	APBD
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 664,839,844,-	APBD
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 295,787,400,-	APBD

Program	Anggaran	Keterangan
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 4,017,600,000,-	APBD
9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 223,284,548,-	APBD

Tanjungpinang, 2 Januari 2024

**PIHAK KEDUA,**  
**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

**PIHAK PERTAMA,**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**Dr. MUHD DALI, M.M**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641128 198903 1 012